



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MOHAMMAD YAMIN AWIE**  
2. Jabatan : **KETUA**  
3. NHK : **7614**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 4.275.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/90 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
2. Tanah Seluas 3900 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah Seluas 480 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/80 m2 di KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 210.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, SUZUKI SWIFT SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 111.200.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 253.106.632

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 4.849.306.632



III. HUTANG

Rp.

183.337.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.665.969.632

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.